LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR: 2/HK.04.1-Kpt/9204/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Terwujutya Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Tersediany Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	Terwujudnya Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu
2	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Tersedianya draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU`Kabupaten Sorong Selatan
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Terwujudnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Terwujudnya Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	Terwujudnya satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu
3	Operasional Perkantoran	Jumlah rancangan Peraturan KPU/	Tersedianya rancangan Peraturan

dan Dukungan Sarana Prasarana	Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Terwujudnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Terwujudnya ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Tersedianya Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Terwujudnya Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	Terwujudnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik